



**KETERJAJAHAN SEKTOR PANGAN SEBAGAI
DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN
NEOLIBERALISM**



SMS Lebaran

Di hari lebaran ini, selamat menyantap:

- ✦ **Ketupat BERAS VIETNAM (10%)**
- ✦ **Opor PAHA AYAM AMERIKA (20%)**
- ✦ **Rendang SAPI AUSTRALIA (30%)**
- ✦ **Bumbu PENYEDAP JEPANG (100%)**
- ✦ **GARAM INDIA (50%)**
- ✦ **Minum SUSU BULE (90%)**
- ✦ **Makan Kue GANDUM LONDO (100%)**
- ✦ **Makan tahu tempe dg KEDELAI IMPOR (70%)**

KEDAULATAN PANGAN

Hak untuk memiliki pangan secara teratur, permanen, bermartabat, dan bebas tanpa rasa takut (FAO)

Hak seluruh rakyat, bangsa dan negara untuk menetapkan kebijakan pangan, tanpa campur tangan negara lain (LVC)

Prinsip Ekonomi Neo Liberal

- ◆ **Kebebasan individu** untuk bersaing di pasar
- ◆ **Kepemilikan pribadi** terhadap faktor-faktor produksi diakui
- ◆ **Pembentukan harga pasar** ditentukan oleh Mekanisme Pasar
- ◆ **Peniadaan Peran Pemerintah** dalam Perekonomian

KELEMAHAN EKONOMI NEO LIBERAL

Mekanisme pasar: Trade off antara pemerataan pendapatan dengan keseimbangan pasar

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang menimbulkan kesenjangan

Trickle down effects: Hasil Pembangunan tidak pernah menetes pada masyarakat lapis ke bawah

INTERVENSI IMF SAAT DILANDA KRISIS EKONOMI 1998

Pemaksaan agenda neoliberalisme secara masif setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997.

Indonesia mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia, akibat diterpa krisis.

IMF memberlakukan Konsensus Washington, yang merupakan prinsip Neoliberalisme

KONSENSUS WASHINGTON,

Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan semua bentuk subsidi;

Liberalisasi perdagangan di semua sektor , termasuk sektor pangan

Pelaksanaan privatisasi BUMN

Penghapusan Peran Bulog sebagai penyangga harga pangan

DAMPAK KONSENSUS WASHINGTON

Penghapusan subsidi BBM mendorong masuknya perusahaan multinasional di bisnis retail BBM.

Privatisasi BUMN mendorong penguasaan 85% saham BUMN oleh korporasi asing.

90% konsesi pertambangan dikuasai MNCs

Liberalisasi sektor pertanian menjadi pemicu ketergantungan dalam penyediaan pangan, yang mengarah pada keterjajahan sektor pangan

LIBERALISASI LEWAT FTA

Indonesia sangat agresif menggalang liberalisasi lewat Free Trade Agreement di semua bidang

Secara teoritis perdagangan tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara lewat spesialisasi komoditas unggul

Prakteknya, liberalisasi lewat FTA justru berdampak negatif pada pasar domestik karena distorsi harga akibat subsidi negara maju yang mendorong dumping

Negara maju via World Bank IMF memaksa negara berkembang memangkas Subsidi

KEBIJAKAN PRO-IMPOR SEKTOR PANGAN

Liberalisasi di sektor pangan mendorong kebijakan Pro-impor

Intervensi World Bank dan IMF serta pemburu rente untuk melanggengkan kebijakan Pro-Import (Candu Import)

Kebijakan Pro-Import mendorong ketergantungan pangan

KEBIJAKAN PRO-IMPOR SEKTOR PANGAN

Pada semester I-2011, impor pangan Indonesia mencapai US\$ 6,35 miliar setara Rp. 53 triliun rupiah

Dibanding Sem I-2010 naik 18,7 mencapai US\$ 5,35

Impor tersebut meliputi: beras, kedelai, jagung, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, cabai kering, tembakau, dan bawang merah.

TARIF BEA MASUK IMPOR

Dalam WTO, Indonesia menotifikasi tarif bea masuk impor

- Beras 9-160%
- Gula 40-95%
- Susu 40-120%

Leralisasi lewat FTA bea masuk:

- beras dan gula 5-30%,
- susu 5%
- Kedelai dan jagung 0%

ANOMALI IMPOR BERAS

Pada 2011 impor beras 1,5 juta ton dengan dalih menjaga stok beras nasional,

BPS mengestimasi produksi padi pada 2011 mencapai 68 juta ton GKG. Dengan rendemen gabah 57% persen dan tingkat konsumsi 139 kg per kapita, diperkirakan surplus 5-6 juta ton ton beras.

Mengapa musti impor?

- Kebijakan pro-impor sudah Mencandu
- Ada tekanan kuat dari Kolonialis dan komparador
- Upaya pemburu rente (birokrat dan saudagar) utk mengeduk keuntungan

Dampaknya: ketergantungan akut di sektor pangan

KETERGANTUNGAN PANGAN

Ketergantungan pangan merupakan bentuk keterjajahan di sektor pangan

Pada saat harga pangan dunia melambung tinggi merupakan ancaman bagi penyediaan pangan dg harga terjangkau

Import pangan akan menguras cadangan devisa negara

Hilangnya sumber mata pencaharian penduduk di pedesaan, yang menimbulkan permasalahan sosial ekonomi

UPAYA MENCAPAI KEDAULATAN PANGAN

Perlindungan terhadap ancaman perdagangan bebas melalui perubahan paradigma kebijakan sesuai konstitusi

Meningkatkan akses sumber – sumber agraria, tanah, air dan alat – alat produksi lainnya, serta akses pasar dan jaringan distribusi

Pemberian subsidi dan KUT bagi Petani

Penetapan Harga yang adil bagi konsumen dan produsen

Revitalisasi Peran Bulog sebagai penyangga

Membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal

Penyusunan grand design kebijakan kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan, di tingkat nasional dan regional dan lokal

Perdagangan	Perdagangan bebas dianggap segalanya atau satu-satunya jalan menuju kesejahteraan rakyat	Pangan dan pertanian dilindungi perdagangan bebas
Tujuan utama produksi	Budidaya tanaman pangan untuk komoditi perdagangan dan ekspor	Budidaya aneka tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri dan pasar lokal
Harga	Terserah pasar (mekanisme pasar murni)	Harga yang adil, memperhitungkan biaya produksi, pendapatan buruh tani, keuntungan bagi petani kecil secara bermartabat
Akses pasar	Pasar luar negeri	Akses ke pasar lokal dan menghentikan investasi pasar agribisnis
Subsidi	Dilarang (namun AS dan UE memberikan subsidi yang besar kepada petaninya yang kaya)	Boleh selama tidak merusak pasar negeri lain. Justru diperlukan untuk petani kecil dan untuk mendukung pertanian berkelanjutan
Pangan	Komoditas yang penting dan menguntungkan (komoditas perdagangan)	Kebutuhan dasar manusia, sehingga harus terjangkau dalam jumlah yang cukup sesuai budaya lokal dan produksi lokal (komoditas sosial)
Pilihan Komoditas	Satu pilihan komoditas untuk efisiensi ekonomi	Pilihan jenis tanaman adalah hak penduduk pedesaan
Efek produksi	Kelaparan karena rendahnya produksi pangan	Masalah akses dan distribusi, karena kemiskinan dan ketidak-adilan
Daya tahan pangan	Dicapai dari manapun (termasuk impor) asal harga murah	Diproduksi sendiri oleh komunitas lokal, keaneka-ragaman pangan berdasarkan histori dan kultur daerah setempat, tidak memaksakan keseragaman pangan
Kontrol terhadap sumber produksi	Diprivatisasi	Lokal dan kontrol oleh komunitas
Benih	Komunitas yang dipatenkan	Lokal, warisan yang menjadi milik bersama
Sumber modal produksi	Dari bank swasta atau perusahaan	Dari pemerintah yang dirancang untuk mendukung petani kecil, modal sendiri, arisan desa, atau serikat tolong menolong.
Dumping	Tidak begitu masalah	Harus dilarang
Monopoli	Tidak masalah	Jadi sumber persoalan, harus dihilangkan
Penggunaan pestisida, racun, pupuk kimia dan rekayasa biologi/genetika	Harapan masa depan	Merusak ekologi dan kesehatan, tidak diperlukan.

MATUR NUWUN